

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Muis. *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- AP. Parlindungan, *Komenlar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Badan Pertahanan Nasional. *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Bumi Bhakti, Jakarta, 2004.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1993.
- Goungioksiong dan G. Soekahar Badwi, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Kinta, Jakarta, 1963.
- Habib Adji, *Pemahaman Terhadap Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan*. Mandar Maju. Bandung, 1999.
- Hasan Wargakusumah, , dkk. *Hukum Agraria I*. Prenhallindo. Jakarta, 2001.
- Irawan Soeroredjo, *Makalah Pembuat Akta Tanah sebagai Profesi*, Pusat Pengkajian Hukum, Newsletter No.29/VIII/Juni/1997.
- Kussunaryatun, *Hukum Acara Perdata Pemeriksaan Perkara Perdata*, Universitas Sebelas Maret, 1999.
- Kusunaryatun, *Hukum Acara Perdata (Pemeriksaan Acara Perdata)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1999.
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983.

N.G.Yudara, *Pokok-pokok Pemikiran, disekitar kedudukan dan fungsi notaris serta akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Renvoi, Nomor.10.34.III, Tanggal 3 Maret 2006.

Oloan Sitorus, dkk. *Pelepasan atau Pergerakan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*. Dasamedia Utama. Jakarta, 1995.

R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Internusa Jakarta, 1986.

R. Wiryono Prodjodokoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991.

S.Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.

Sunardi, *Hukum Agraria*. Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005.

B. Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30. Tahun 2004. Taentang jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

